

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Dan Masalah Penelitian

Kemiskinan merupakan permasalahan yang hampir dihadapi oleh seluruh negara, baik negara maju maupun negara berkembang, dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Di Indonesia sebagai negara berkembang, kemiskinan masih menjadi isu yang serius karena berdampak pada ketidakmampuan sebagian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, kondisi kemiskinan juga ditandai oleh keterbatasan kepemilikan aset, minimnya akses terhadap faktor produksi, serta rendahnya tingkat pendidikan.(Daulay, 2024). Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Utara, perkembangan jumlah penduduk miskin selama periode tahun 2020 hingga 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 1. 1
Data kemiskinan kabupaten aceh utara

Tahun 2020 - 2025

Tahun	Jumlah Penduduk miskin
2020	106,41 Ribu Jiwa
2021	109,49 Ribu Jiwa
2022	107,02 Ribu Jiwa
2023	106,77 Ribu Jiwa
2024	104,49 Ribu Jiwa
2025	104,48 Ribu Jiwa

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara, 2026

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dan tabel 1.1 tersebut, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Aceh Utara dalam lima tahun terakhir masih tergolong tinggi. Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 106,41 ribu jiwa, kemudian meningkat menjadi 109,49 ribu jiwa pada tahun 2021. Selanjutnya pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 107,02 ribu jiwa, tahun 2023 sebanyak 106,77 ribu jiwa, dan tahun 2024 menjadi 104,49 ribu jiwa. Pada tahun 2025 jumlah penduduk miskin tercatat sekitar 104,48 ribu jiwa. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan kesejahteraan ekonomi masyarakat masih menjadi perhatian penting di Kabupaten Aceh Utara.

Dalam konteks global, pengentasan kemiskinan juga menjadi prioritas utama dalam Sustainable Development Goals (SDGs), di mana penghapusan kemiskinan ditetapkan sebagai tujuan pertama sebagai landasan utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2023). Untuk membantu masyarakat miskin agar tetap memenuhi kebutuhan sehari-hari maka pemerintah mengeluarkan program kompensasi yang berupa program keluarga harapan (PKH).

Tujuan utama dari PKH adalah mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan sumber daya manusia terutama kelompok masyarakat miskin dengan upaya percepatan pencapaian target dan sasaran perkembangan dimasa yang akan datang, sedangkan tujuan jangka panjang untuk memutus mata rantai kemiskinan keluarga penerima PKH melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak serta memberikan kepastian akan masa depan anak dan mengubah perilaku. Tujuan tersebut sekaligus mendukung dalam upaya

mempercepat pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu pengurangan penduduk miskin. (Daulay, 2024)

Hasil dari para peneliti terdahulu tersebut menunjukkan bahwa program PKH yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat pra sejahtera telah sesuai dengan tujuan bantuan tersebut di mana programnya memiliki tujuan dalam memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan serta meningkatkan daya beli masyarakat yang kurang mampu. Namun hasil dari observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti pada penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara. (Suraharta, 2024) menunjukkan kondisi yang berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya. Di lapangan masih ditemukan beberapa permasalahan seperti pendistribusian bantuan yang belum merata, sasaran penerima yang kurang tepat, serta adanya indikasi penyalahgunaan bantuan yang dapat menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan program PKH yang telah di rancang oleh pemerintah dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengelolaan dana PKH belum sepenuhnya berjalan efektif dan optimal. Oleh karena itu, muncul pertanyaan penting mengenai sejauh mana efektivitas pengelolaan dana PKH serta bagaimana peran Sistem Informasi Akuntansi dalam mendukung ketepatan sasaran, ketepatan waktu penyaluran, dan transparansi pengelolaan dana tersebut. Dengan kata lain, masih terdapat kesenjangan antara harapan (teori) dan kenyataan

(praktik), sehingga hal ini menjadi dasar penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

Adapun hasil wawancara telah dilakukan terhadap salah satu pendamping PKH di Kecamatan Tanah Jambo Aye sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di kantor camat Kecamatan Tanah Jambo Aye dengan salah satu pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu Ibu Cut, diketahui bahwa pengelolaan dana PKH pada tahun 2018 sampai dengan 2026 telah memanfaatkan sistem pencatatan berbasis aplikasi yang dikenal sebagai Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Aplikasi ini digunakan dalam berbagai tahapan pengelolaan, mulai dari pendataan, verifikasi, hingga pelaporan administrasi secara digital, dengan tujuan meningkatkan ketepatan data serta transparansi dalam penyaluran bantuan sosial. Penerapan tersebut sejalan dengan konsep Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang dikemukakan oleh Romney dan Steinbart (2023), yaitu suatu sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan, mencatat, mengolah, dan menyajikan informasi keuangan secara relevan, andal, dan tepat waktu guna mendukung proses pengambilan keputusan.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin (Aisyah & Kamarni, 2024). Akan tetapi, berdasarkan hasil observasi di lapangan, khususnya di Kecamatan Tanah Jambo Aye, masih ditemukan kondisi yang berbeda, seperti keterlambatan dalam penyaluran dana, ketidaktepatan sasaran penerima manfaat, serta belum optimalnya transparansi pengelolaan program.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara temuan penelitian sebelumnya dengan realitas empiris di lapangan. Hal ini sejalan dengan penelitian (Sugiarto *et al.*, 2024) yang menyatakan bahwa pelaksanaan PKH di beberapa daerah masih menghadapi berbagai hambatan teknis maupun administratif.

Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak menempatkan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai faktor utama yang berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, sedangkan peran Sistem Informasi Akuntansi masih jarang diuji sebagai variabel utama yang memengaruhi kualitas pengelolaan dana bantuan sosial. Padahal, secara teoritis SIA memiliki fungsi penting dalam meningkatkan transparansi, ketepatan, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan. Penelitian Musdalifah dan Hariyanto (2024) juga menegaskan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi berkontribusi terhadap peningkatan transparansi, meskipun kajiannya belum banyak dikaitkan secara langsung dengan program bantuan sosial seperti PKH.

Sejauh ini, pendekatan yang digunakan dalam berbagai penelitian umumnya masih berfokus pada model analisis pengaruh langsung (*direct effect*) antar variabel, tanpa memperhatikan adanya hubungan tidak langsung melalui variabel mediasi. Padahal, keterkaitan antara penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dan kesejahteraan masyarakat diduga turut dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan dana sebagai variabel *intervening*. Hal ini didukung oleh penelitian (Hair, 2021) yang menjelaskan bahwa penggunaan model mediasi dapat memberikan gambaran hubungan antar variabel secara lebih menyeluruh. Meskipun demikian, pendekatan

tersebut masih relatif jarang diterapkan dalam penelitian yang membahas Program Keluarga Harapan (PKH).

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kebutuhan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai peran Sistem Informasi Akuntansi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana PKH serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menjadi penting karena tidak hanya mengkaji efektivitas program PKH, tetapi juga menekankan peran sistem informasi akuntansi sebagai faktor kunci dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Pengelolaan Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Dan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Miskin Di Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara.”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan diantaranya sebagai berikut:

1. Apakah Penerapan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Program Keluarga Harapan (PKH)?
2. Apakah Pengelolaan Dana Program Keluarga Harapan (PKH) berpengaruh terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Miskin?
3. Apakah Penerapan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Miskin?

4. Apakah Pengelolaan Dana Program Keluarga Harapan (PKH) mampu memediasi pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Miskin?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Pengelolaan Dana Program Keluarga Harapan (PKH).
2. Untuk menganalisis pengaruh Pengelolaan Dana Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Miskin.
3. Untuk menganalisis pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Miskin.
4. Untuk menganalisis peran Pengelolaan Dana Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memediasi pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Miskin.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya literatur ilmiah mengenai pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap pengelolaan dana bantuan sosial, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH).

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa di bidang akuntansi sektor publik, sistem informasi akuntansi, dan kesejahteraan masyarakat.

Memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan teori mengenai hubungan antara sistem informasi akuntansi, efektivitas pengelolaan dana, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin.

2. Manfaat Praktis

Bagi pemerintah daerah dan pengelola PKH, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam meningkatkan efektivitas penerapan sistem informasi akuntansi agar pengelolaan dana PKH menjadi lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Bagi pendamping sosial dan aparat desa, penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya penggunaan sistem informasi akuntansi dalam pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana bantuan sosial.

Bagi masyarakat penerima manfaat PKH, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pengelolaan dana bantuan sosial, karena sistem informasi akuntansi yang baik dapat memastikan penyaluran dana dilakukan secara tepat sasaran.

Bagi peneliti sendiri, penelitian ini dapat menjadi pengalaman akademis dan praktis dalam memahami penerapan sistem informasi akuntansi di lingkungan pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan program bantuan sosial.